

IMPLEMENTASI PROGRAM MACA DINA DIGITAL LIBRARY (CANDIL) OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS

Salsabila Azalea Korneli

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : salsabilaazalea882@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Program Maca Dina Digital Library (CANDIL) Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari: Informasi dan sosialisasi yang diberikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis mengenai program tersebut hanya sedikit dan berakibat pada jumlah masyarakat yang mengetahui program tersebut hanya sedikit itu pun kebanyakan sebagian pengunjung perpustakaan saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Maca Dina Digital Library (CANDIL) Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis. Metode penelitian adalah metode deskriptif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan serta studi lapangan berupa observasi dan wawancara kepada sepuluh informan dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Maca Dina Digital Library (CANDIL) belum optimal. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil penelitian dimana masih ditemukan dari enam dimensi sebagai alat ukur hanya satu dimensi yang sudah berjalan, sedangkan lima dimensi lain belum berjalan.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Program Maca Dina Digital Library (CANDIL)*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju lalu canggihnya teknologi mendorong perubahan dalam dunia perpustakaan buku. Yang kemudian berinovasi dalam membuat perpustakaan buku yang berbentuk format digital yang bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja

melalui media internet dan aplikasi yang ada di gadget ataupun komputer yang akan memudahkan para pembaca buku dan pemustaka.

Apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini banyak orang seperti mahasiswa, pelajar dan masyarakat yang menghabiskan sebagian waktunya di rumah saja karena pembatasan kegiatan di luar

rumah untuk mencegah penyebaran dan memutus mata rantai virus Covid-19 karena berkumpul atau berkerumun. Mereka bisa mengisi waktu luang dengan mengakses perpustakaan digital (*digital library*). Ditambah lagi ada sebagian perpustakaan umum dan perpustakaan daerah yang ditutup karena menghindari kerumunan orang atau orang berkumpul, ada juga yang membatasi pengunjung hanya 50% yang ada di perpustakaan umum maupun perpustakaan daerah. Ketentuan tersebut membuat orang – orang kesulitan untuk membaca buku, meminjam buku, mencari referensi dan lain – lainnya dari perpustakaan umum maupun perpustakaan daerah. Sehingga perpustakaan digital (*digital library*) menjadi solusi membaca buku, meminjam buku, mencari referensi dan lain – lainnya dikala masa pandemi Covid-19 agar aktivitas tersebut tidak terganggu atau terhenti dan keinginan minat membaca semakin tinggi lagi.

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan telah memberikan kepada dunia kepustakawanan Indonesia sebuah peluang untuk memperkuat diri dan lebih menyatakan eksistensi perpustakaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya digitalisasi koleksi buku perpustakaan termasuk ke dalam kegiatan pengelolaan koleksi dan/atau penyelenggaraan pelayanan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014

yang menyatakan perpustakaan yang telah dimiliki sarana dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:

- 1) Pengelolaan koleksi
- 2) Penyelenggaraan pelayanan
- 3) Pengembangan perpustakaan
- 4) Kerja sama perpustakaan

Studi pendahuluan yang telah dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis, diperoleh informasi dari salah satu pegawai perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis, bahwa terkait penerapan perpustakaan digital (*digital library*) masih belum berjalan karena tidak adanya anggaran untuk mempunyai perpustakaan digital (*digital library*) milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis sendiri. Maka dari itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis menerapkan program Maca Dina Digital Library (CANDIL), yaitu program yang diluncurkan pemerintah Daerah Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat yang diharapkan bisa meningkatkan dan merangsang gemar membaca masyarakat Daerah Jawa Barat sehingga masyarakat Kabupaten Ciamis bisa mengaksesnya juga. Tetapi, program tersebut tidak tertuang dalam Undang – Undang atau Peraturan secara khusus hanya saja program tersebut dibuat berlandaskan Undang – Undang Perpustakaan

Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tetapi, pada kenyataannya masyarakat atau pengunjung perpustakaan belum tahu adanya program tersebut. Adapun sebagian masyarakat atau pengunjung perpustakaan yang mengetahui program tersebut, tapi mereka tidak tahu program tersebut untuk apa dan bagaimana cara menggunakan program tersebut dengan benar. Padahal masyarakat atau mahasiswa dan pelajar sangat membutuhkan program tersebut, karena program tersebut sangat bermanfaat untuk mendukung proses belajar di zaman yang serba menggunakan gadget dan komputer. Seperti membaca buku dan meminjam buku dalam mendapatkan referensi untuk tugas kuliah dan sekolah mereka tidak perlu kesulitan sehingga menghemat pengeluaran tidak perlu membeli buku yang mahal cukup dengan memanfaatkan program tersebut dengan baik.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut maka selanjutnya dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengetahui tentang Implementasi Program Maca Dina Digital Library (CANDIL) terutama yang berkaitan dengan masalah perpustakaan digital (*digital library*) yang penting bagi aktivitas membaca masyarakat. Adapun fokus penelitian ini adalah untuk memperhatikan Implementasi Program Maca Dina Digital Library (CANDIL) Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis, diketahui bahwa Implementasi Program Maca Dina Digital Library (CANDIL) Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya optimal. Hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi; masih belum tersampainya Program Maca Dina Digital Library (CANDIL) Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis dengan baik kepada masyarakat luas atau pengunjung perpustakaan.
- 2) Kesiapan dan keseriusan pelaksana; para pelaksana seakan acuh tak acuh terhadap jalannya Program Maca Dina Digital Library (CANDIL) seperti tidak peduli adanya program tersebut.
- 3) Satuan unit pelaksana; tidak jelasnya satuan unit pelaksana bidang apa yang bertugas menangani atau bertanggung jawab terhadap Program Maca Dina Digital Library (CANDIL).

Dengan melihat pada penjelasan di atas terkait dengan adanya indikator – indikator permasalahan dalam Program Maca Dina Digital Library (CANDIL), tentunya dipandang perlu untuk dilakukan penanganan yang lebih lanjut agar tidak menimbulkan masalah dalam hal kebutuhan akan membaca buku dan meminjam buku yang

nantinya membuat masyarakat tidak tahu.

KAJIAN TEORITIS

1. Implementasi

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (1991:21), Implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

2. Kebijakan Publik

Lasswell dan Easton (Agustino, 2020:15) mengatakan dan memaknai bahwa kebijakan adalah aktivitas pemerintah yang mempunyai tujuan, memiliki nilai tertentu dan memberikan dampak (positif) bagi masyarakat luas.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan oleh Wahab (Iskandar, 2005:25) sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif atau Dekrit Presiden. Selanjutnya, Wahab juga mengemukakan beberapa pandangan dari Pressman dan Wildavsky yang menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui

bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran
2. Adanya aktivitas atau sasaran kebijakan, dan
3. Adanya output atau hasil kegiatan.

4. Model Implementasi Kebijakan Donald van Metter dan Carl van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh van Metter dan van Horn disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implemntation*.

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik.

Menurut van Metter dan van Horn (Agustino, 2020:151) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat

tergantungan dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

Tetapi, di luar sumber daya manusia, sumber daya – sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri – ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penolakan atau penerimaan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak

– pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan – kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter dan van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif akan menjelaskan tentang objek yang sedang diteliti secara mendetail dengan hasil penelitian berupa uraian deskriptif dan berbagai analisis yang selanjutnya pertanyaan dalam penelitian dapat terjawab. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan studi kepustakaan serta studi lapangan berupa observasi dan wawancara kepada sepuluh informan dengan teknik purposive sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun peneliti melakukan penelitian berdasarkan fokus kajian yang merujuk pada Model Implementasi Kebijakan Donald van Metter dan Carl van Horn (Agustino, 2020:150) dengan enam dimensi, yaitu (1) Ukuran dan tujuan kebijakan; (2) Sumber daya; (3) Karakteristik Agen Pelaksana; (4) Sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana; (5) Komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana; dan (6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Hasil penelitian Implementasi Program Maca Dina Digital Library (CANDIL) Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis untuk setiap dimensi sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan tersebut dari pemerintah bisa tercapai untuk kepentingan masyarakat.

Hasil penelitian dimensi ukuran dan tujuan kebijakan dapat diketahui masih belum optimal. Dilihat dari dua indikator adanya target atau hasil yang diinginkan dari kebijakan yang dibuat dan kebijakan yang dibuat memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, hal ini terlihat dari adanya salah satu indikator yang belum seutuhnya terwujudkan yaitu target atau hasil yang belum tercapai dari

program tersebut. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh van Metter dan van Horn (Agustino, 2020:151) : Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Berdasarkan teori di atas dapat diketahui bahwa tercapainya tujuan dan sasaran dari suatu program mempengaruhi kinerja dari implementasi program tersebut. Apabila dalam realisasinya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dari program tersebut maka implementasinya belum sepenuhnya dapat dikatakan optimal.

2. Sumber Daya

Sumber daya sangat penting dalam implementasi program, karena jika tidak ada sumber daya apalagi kekurangan sumber daya manusianya lantas bagaimana program tersebut dapat berjalan dengan baik dan direalisasikan untuk masyarakat.

Hasil penelitian dimensi sumber daya dapat diketahui belum optimal. Dilihat dari dua indikator ketersediaan sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan, hal ini terlihat dari adanya salah satu indikator pada sumber daya

manusia karena kualitasnya yang masih rendah dalam menjalankan program tersebut. Menurut van Metter dan van Horn (Agustino, 2020:151) : Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap – tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.

Berdasarkan teori di atas, dapat diketahui bahwa memiliki para pelaksana dengan sumber daya yang berkualitas merupakan hal yang terpenting dalam menentukan proses implementasi suatu program dapat berjalan dengan optimal.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Tanpa adanya pelaksana kebijakan atau program maka kebijakan atau program tersebut tidak dapat berhasil sehingga dengan kata lain tidak ada manajemen, karena tidak adanya pelaksana yang mengatur atau mengelola program tersebut untuk sampai ke masyarakat.

Hasil penelitian dimensi karakteristik agen pelaksana dapat dikatakan belum optimal. Dilihat dari adanya dua indikator pembentukan unit pelaksana program dan adanya tugas pokok dan fungsi satuan unit pelaksana, hal ini terlihat dari salah satu indikator yaitu pada pembentukan unit pelaksana program. sejalan dengan yang dikatakan van Metter dan van Horn (Agustino, 2020:152) ‘Pusat

perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik’.

Dari teori di atas, dapat diketahui bahwa pembentukan unit kerja dalam suatu pengimplementasian program menjadi penting, hal ini dikarenakan akan tercantum prosedur teknis pelaksanaan serta tugas pokok dan fungsi para pelaksana dengan jelas, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penolakan atau penerimaan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

Hasil penelitian dimensi sikap atau kecenderungan (*disposition*) dapat dikatakan sudah optimal, hal ini terlihat dari dua indikator yang telah terpenuhi yaitu kesiapan pelaksana dalam mengerjakan tugas dan adanya keseriusan pelaksana dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. van Metter dan van Horn (Agustino, 2020:152) menyebutkan : Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang

mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

Dari teori di atas diketahui bahwa siap atau tidaknya para pelaksana dalam mengimplementasikan program berdampak pada kinerja implementasi dari program tersebut, jika para pelaksana memiliki sikap penolakan pada dirinya (keterpaksaan dalam menjalankan tugasnya) maka akan menghambat proses implementasi program dalam mencapai tujuannya.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi secara rutin antar-organisasi dan aktivitas pelaksana yang terjadi akan menghasilkan koordinasi yang berupa komunikasi antara pihak – pihak yang terlibat agar penerapan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Hasil penelitian dimensi komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana dapat dikatakan masih kurang optimal. Dilihat dari dua indikator komunikasi antara pihak – pihak yang terlibat dan kerja sama antara pihak – pihak yang terlibat, hal ini terlihat tidak adanya waktu yang rutin atau terjadwal untuk komunikasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat ditambah adanya pergantian kepengurusan di Dinas tersebut sehingga komunikasi terputus. van Metter dan van Horn (Agustino, 2020:153) mengemukakan: Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik

koordinasi dan komunikasi di antara pihak – pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan – kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

Dari teori di atas dapat diketahui bahwa untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam mencapai tujuan dari suatu program, maka hendaknya dilakukan komunikasi yang baik dan jelas di antara pihak – pihak yang terlibat dalam program tersebut.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Implementasi program tersebut memandang bahwa bukan hanya lingkungan internal saja tempat dimana program tersebut diterapkan yang berpengaruh kepada berhasil atau tidaknya program tersebut, tetapi lingkungan internal juga berpengaruh kepada berhasil atau tidaknya implementasi program tersebut diterapkan. Karena lingkungan eksternal dapat menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik atau program, jika lingkungan eksternal kondusif bukan tidak mungkin implementasi kebijakan publik atau program tercapai dan berhasil.

Hasil penelitian dimensi lingkungan ekonomi, sosial dan politik dapat dikatakan kurang kondusif. dilihat dari tiga indikator kondisi ekonomi di lingkungan masyarakat, kondisi sosial di lingkungan masyarakat dan kondisi politik di

lingkungan masyarakat. hal ini dikarenakan kemunculan wabah virus Covid – 19 atau corona yang sempat melumpuhkan kegiatan perekonomian dan aktivitas sosial masyarakat, seharusnya ketika ada Program Maca Dina Digital Library (CANDIL) masyarakat baik mahasiswa dan pelajar akan terbantu dalam memenuhi kebutuhan akan membaca buku yang terbatas karena tidak adanya budget untuk membeli buku, Perpustakaan Daerah ditutup dan koleksi buku di Perpustakaan Daerah tidak lengkap di masa pandemi seperti ini. Tetapi kenyataannya masyarakat banyak yang tidak tahu program tersebut. Sejalan dengan penjelasan di atas, Mazmanian dan Sabatier (Agustino: 2020:166) mengatakan: Perbedaan waktu dan perbedaan di antara wilayah – wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang – undang. Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawantahan suatu kebijakan publik.

Dari teori di atas dapat diketahui bahwa keadaan lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari tidak optimalnya pengimplementasian suatu program, sehingga tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh program tidak berjalan secara efektif.

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang Implementasi Program Maca Dina Digital Library (CANDIL) Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis, bahwa belum optimal dari enam dimensi yang dijadikan sebagai alat ukur hanya satu dimensi yang sudah berjalan, sedangkan lima dimensi lain belum berjalan. Diketahui terdapat beberapa dimensi yang belum terpenuhi, seperti Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik agen pelaksana, Komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana serta Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agustino, Leo. (2020). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke – 2)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Iskandar, Jusman. (2005). *Kapita Selekta Administrasi Negara & Kebijakan Publik*. Bandung: Puspaga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- Purwanto & Sulistyastuti. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.